

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi cukup besar di bidang kelautan dan perikanan. Hal ini dikarenakan Indonesia dikenal sebagai negara maritime yaitu negara yang bergerak pada sektor perairan, memiliki wilayah territorial laut yang luas dan memiliki banyak pulau, serta terdapat sumber daya alam yang melimpah sehingga dalam laut tersebut banyak sekali hasil laut yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia.

Indonesia terdiri atas 70% lautan dan 30% daratan, memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan garis pantai lebih dari 99.000 km. Luas wilayah perairan sebesar 6,32 juta km² yang didalamnya terdapat hasil laut untuk komoditi ekspor dan kebutuhan dalam negeri, seperti ikan, ranjungan, kepiting, cumi, udang dan lain sebagainya.¹ Kondisi ini menyebabkan sebagian besar penduduk Indonesia memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, terutama penduduk yang berdomisili di wilayah pesisir atau perairan Indonesia. Nelayan dapat diartikan sebagai masyarakat nelayan, bukan berarti mereka yang dalam mengatur hidupnya hanya mencari ikan di laut untuk menghidupi keluarganya, akan tetapi juga orang-orang yang internal dalam lingkungan itu.²

Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) jumlah nelayan di Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 2,23 juta orang, dimana jumlah

¹ Daniel Mohammad Rosyid, *Menuju Kedaulatan Maritim Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016), hlm. 19

² Richard Stanford dan Rudi Febriansyah, *Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Nelayan*, (Padang: Andalas University Press, 2017), hlm. 2

ini mengalami penurunan sebesar 10,44% dibanding tahun 2019 karena pada tahun 2019 jumlah nelayan di Indonesia adalah 2,49 juta orang.³ Mayoritas nelayan di Indonesia terbagi dalam beberapa skala usaha, seperti nelayan dengan skala usaha kecil, menengah dan besar. Nelayan dengan skala kecil ini biasanya bersifat individu, dimana mereka melaut dengan menggunakan perahu kecil dan hasil tangkapan terbatas. Pada umumnya hasil tangkapan nelayan kecil ini hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan lingkungan sekitar. Sementara itu nelayan sedang adalah nelayan yang melaut dengan tujuan tangkapan untuk permintaan luar daerah, sedangkan nelayan besar adalah nelayan yang melaut dengan tujuan tangkapan untuk komoditi ekspor.⁴

Keberadaan nelayan ini tentu menjadi potensi tersendiri bagi Indonesia, karena selain berperan dalam perekonomian, keberadaan nelayan juga menjadi mata pencaharian yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup nelayan itu sendiri. Akan tetapi dalam faktanya nelayan di Indonesia justru memiliki perekonomian rendah sehingga taraf hidup berada dibawah rata-rata. Kondisi ini sering terjadi pada nelayan skala kecil dan sedang. Kondisi ini disebabkan adanya keterbatasan modal dan pengetahuan yang dimiliki oleh nelayan, sehingga mereka tidak mampu mencapai hasil yang optimal dalam melaut.⁵

Beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh nelayan adalah keterbatasan kapal sebagai armada untuk melaut, biaya solar yang tinggi, belum

³ Laporan Data Nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia, <https://kkp.go.id> diakses 12 Januari 2023

⁴ Alessandro C. Vindi., S.S. Durand dan O.V. Kotambunan, Peran Anggota Keluarga Nelayan Terhadap Ekonomi di Bahowo Kelurahan Tongkaina Kecamatan Bunaken Kota Manado, *Jurnal Akulturasi*, Volume 7, Nomor 2, 2019, hlm. 1334

⁵ Richard Stanford dan Rudi Febriansyah, *Op.,Cit*, hlm. 3

ada asuransi jiwa untuk nelayan, modal terbatas, keterampilan dan keahlian terbatas sehingga belum mampu melakukan penyimpanan dan pengelolaan hasil tangkapan dengan baik, terbatasnya informasi cuaca, serta jaringan pemasaran yang terbatas.⁶

Permasalahan ini secara merata dirasakan oleh nelayan yang ada di Indonesia, termasuk nelayan di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hal ini dikarenakan Kecamatan Nipah Panjang memiliki karakteristik geografis pesisir pantai sehingga banyak terdapat habitat spesies laut, seperti ikan, udang, ranjungan, kepiting dan lain sebagainya.

Kecamatan Nipah Panjang merupakan daerah pesisir pantai di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan kondisi gelombang laut tenang dan terdapat habitat untuk berbagai jenis spesies laut, sehingga banyak masyarakat di kelurahan ini yang berprofesi sebagai nelayan.⁷ Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan menunjukkan bahwa di Kecamatan Nipah Panjang I memiliki luas wilayah 234,7 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 6.905 jiwa dan jumlah kepala keluarga sebanyak 2.868 KK. Dari jumlah KK tersebut, maka sebanyak 664 KK memiliki profesi sebagai nelayan.⁸

Rata-rata nelayan di Kecamatan Nipah Panjang ini beroperasi dengan menggunakan perahu pompong dan adapula beberapa nelayan yang sudah menggunakan kapal besar, namun jumlahnya lebih sedikit dibanding nelayan yang

⁶ Endang Retnowati, Nelayan Indonesia dalam Pusaran Kemiskinan Struktural, *Jurnal Perspektif*, Volume XVI, Nomor 3, 2011, hlm. 153

⁷ Astri Wahyuni, Pengetahuan Lokal Nelayan Mengenai Udang di Kelurahan Nipah Panjang I Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi, *Artikel Ilmiah*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi, 2017, hlm. 4

⁸ Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2023

menggunakan pompon. Selanjutnya hasil tangkapan nelayan di Kecamatan Nipah Panjang ini ada yang langsung dijual dalam bentuk segar, serta adapula yang dijual dalam bentuk olahan, seperti diolah menjadi kerupuk ikan dan menjadi ikan asin. Biasanya tangkapan yang dijual dalam bentuk olahan menjadi kerupuk dan ikan asin ini adalah hasil tangkapan yang memiliki nilai jual rendah, seperti ikan yang berukuran kecil sehingga murah jika harus dijual dalam bentuk segar.

Nelayan di Kecamatan Nipah Panjang ini merupakan nelayan lokal yang menghadapi berbagai permasalahan, seperti sulitnya mendapat solar dan harga solar yang meningkat, alat tangkap dan perahu pompong yang terbatas karena sudah banyak yang rusak dan nelayan tidak memiliki modal untuk melakukan perbaikan, keterbatasan peralatan untuk menyimpan hasil tangkapan selama mereka melaut sehingga kualitas tangkapan menurun dan harga menjadi lebih murah, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan merusak ekosistem hasil tangkapan, serta harga yang belum stabil dan jaringan pasar yang terbatas sehingga banyak nelayan yang menjual hasil tangkapan melalui tengkulak dengan harga yang lebih murah. Permasalahan lain yang dihadapi nelayan di Kecamatan Nipah Panjang ini adalah keterampilan dalam mengolah hasil tangkapan, sehingga nelayan hanya bisa mengolah dalam bentuk kerupuk dan ikan asin saja.⁹

Kondisi ini tentu berdampak pada kehidupan nelayan di Kecamatan Nipah Panjang, dimana mayoritas nelayan di wilayah ini memiliki keterbatasan ekonomi dan kesejahteraan hidup belum tercapai. Oleh karena itu, pemerintah harus

⁹ Hasil Observasi dan Wawancara Awal dengan Staf Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tanggal 20 Februari 2023

melakukan upaya-upaya khusus untuk memberdayakan masyarakat nelayan di Kecamatan Nipah Panjang agar mereka mandiri dan menjadi nelayan yang sukses memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada hal ini pemerintah yang dimaksud adalah pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah menegaskan bahwa salah satu tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Perikanan adalah melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pemberdayaan di bidang kelautan dan perikanan, termasuk membina dan memberdayakan nelayan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Oleh karena itu, Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki sasaran khusus dalam kinerjanya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat nelayan, termasuk nelayan di Kecamatan Nipah Panjang.

Salah satu yang dilakukan adalah mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pembudidaya Ikan dan Nelayan Tradisional. Peraturan daerah tersebut merupakan kebijakan dari pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap masyarakat nelayan. Dari peraturan tersebut, maka program-program pemberdayaan yang sudah dilakukan oleh pemerintah melalui

Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2020-2021 sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Program Pemberdayaan Nelayan di Kecamatan Nipah Panjang
Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2020-2021

No	Tahun Pelaksanaan	Aspek	Program
1	2020	Peningkatan keterampilan nelayan	a. Melakukan bimbingan teknis dan pelatihan kepada nelayan melalui koordinasi dengan Dinas Perikanan Provinsi Jambi. b. Melakukan pelatihan keterampilan pembukuan untuk pengelolaan usaha penangkapan ikan
2	2021	Peningkatan sarana dan prasarana	Memberikan bantuan alat tangkap, bantuan kepompong/perahu
		Peningkatan kelembagaan	Membantu nelayan membentuk kelompok tani dan menyediakan penyuluh

Sumber : Data Diolah Peneliti dengan Sumber Data Dari Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (2023)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa selama tahun 2020-2021 Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melakukan program untuk peningkatan SDM nelayan dengan cara peningkatan produktivitas, memberikan bimbingan teknis, memberikan bantuan alat tangkap, peningkatan kelembagaan dan pembukuan usaha nelayan.¹⁰ Selain melakukan upaya pemberdayaan dengan meningkatkan keterampilan dan kelembagaan, Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan yang selama ini dihadapi oleh nelayan, diantaranya adalah sebagai berikut:

¹⁰ Hasil Observasi dan Wawancara Awal dengan Staf Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tanggal 20 Februari 2023

Tabel 1.2.
Upaya Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam
Mengatasi Permasalahan Nelayan di Kecamatan Nipah Panjang
Tahun 2020-2021

No	Permasalahan Yang Dihadapi Nelayan	Upaya
1	Kurang pengetahuan mengenai pemanfaatan pendapatan untuk pengembangan usaha	Melakukan bimbingan teknis dan pelatihan kewirausahaan untuk masyarakat nelayan
2	Keterbatasan keterampilan dan pengetahuan dalam menyusun pembukuan pengelolaan usaha penangkapan ikan	Melakukan pelatihan keterampilan pembukuan untuk pengelolaan usaha penangkapan ikan, serta pembinaan pembentukan kelembagaan nelayan
3	Keterbatasan keterampilan untuk mengolah hasil tangkapan	Memberikan pelatihan keterampilan pengolahan hasil tangkapan bagi nelayan
4	Alat tangkap yang mudah rusak dan tidak ramah lingkungan	Memberikan bantuan alat tangkap yang ramah lingkungan
5	Perahu/pompong yang sudah tidak layak pakai	Memberikan bantuan perahu untuk akomodasi nelayan dalam melaut
6	Mahal harga solar dan sulit mendapat solar bersubsidi	Membantu nelayan untuk memperoleh solar bersubsidi
7	Kurangnya keterampilan dalam pengembangan usaha	Melakukan bimbingan teknis dan pelatihan kewirausahaan untuk masyarakat nelayan

Sumber : Data Diolah Peneliti dengan Sumber Data Dari Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (2023)

Upaya pemberdayaan dan upaya mengatasi masalah yang dilakukan oleh Dinas Perikanan ini hanya dilakukan pada tahun 2020 dan 2021. Akan tetapi pada tahun 2022, Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum melakukan upaya pemberdayaan dikarenakan adanya kendala dalam hal pembiayaan atau pendanaan untuk melakukan pemberdayaan. Kendala pembiayaan atau pendanaan ini juga menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, karena

keterbatasan dana menyebabkan program pemberdayaan tidak dapat dilaksanakan. Permasalahan berikutnya adalah adanya nelayan yang tidak menjaga dan memelihara hasil pemberdayaan, seperti tidak menjaga bantuan alat tangkap dari pemerintah, sehingga banyak alat tangkap yang rusak, serta petani yang belum menerapkan apa yang diajarkan waktu pembinaan dan pelatihan.¹¹

Meskipun demikian mayoritas nelayan di Kecamatan Nipah Panjang ini sangat menerima program yang telah ditetapkan oleh Dinas dan permasalahan mereka sedikit teratasi. Beberapa dampak yang dirasakan oleh nelayan dari adanya upaya kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah dampak terhadap usaha nelayan, dimana sudah ada sebagian nelayan yang memiliki usaha sampingan untuk mengolah hasil tangkapan, seperti dijadikan kerupuk ikan. Kemudian dampak terhadap lingkungan dan kelembagaan nelayan, karena saat ini nelayan di Kecamatan Nipah Panjang telah tergabung dalam kelompok tani nelayan sehingga mereka bisa saling berdiskusi ketika menghadapi suatu permasalahan, serta mempermudah nelayan untuk memperoleh bantuan dari pemerintah. Namun dari segi kemampuan nelayan kurang memberikan dampak yang optimal, karena masih ada nelayan yang belum memiliki kemampuan terhadap keterampilan usaha sehingga masih diperlukan upaya-upaya lebih optimal dari Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar kegiatan pemberdayaan yang dilakukan dapat memberikan dampak optimal terhadap kehidupan masyarakat nelayan di Kecamatan Nipah Panjang.

¹¹ Hasil Observasi dan Wawancara Awal dengan Staf Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tanggal 20 Februari 2023

Pada dasarnya, penelitian ini mengacu dari beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi. Adapun penelitian terdahulu tersebut sebagai berikut:

Penelitian Tuasamu (2019) dengan judul “Orientasi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Nelayan) di Dusun Mamua Desa Hilla Kecamatan Leihitu”. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian Tuasamu ini adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar masyarakat nelayan yang ada di wilayah pesisir ini dapat mandiri dan memiliki keterampilan. Selain itu, permasalahan yang dibahas adalah upaya setelah pemberdayaan tersebut dilakukan. Metode yang digunakan dalam penelitian Tuasamu ini adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian Tuasamu ini menunjukkan bahwa dalam perencanaan orientasi sasaran pemberdayaan masyarakat sudah sering dilakukan, sehingga semua kebutuhan oleh nelayan dapat terpenuhi. Artinya dalam hal ini pemerintah daerah sudah berhasil melakukan pemberdayaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga sudah melakukan evaluasi terhadap pemberdayaan masyarakat nelayan juga sudah dilakukan sehingga nelayan dapat merasakan dampak dari pemberdayaan tersebut.¹²

Penelitian Windasai dkk (2021) dengan judul “Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Kepulauan Masalembu Kabupaten Sumenep)”. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah peran pemerintah dalam pemberdayaan nelayan agar masyarakat nelayan di

¹² Farah Dessy Tuasamu, Orientasi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Nelayan) di Dusun Mamua Desa Hilla Kecamatan Leihitu, *Jurnal Academia Praja*, Vol. 2, No. 1, 2019

Kepulauan Masalembu Kabupaten Sumenep dapat memiliki keterampilan yang layak untuk mengelola hasil tangkapannya. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan lembar wawancara, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pemberdayaan nelayan di Kepulauan Masalembu belum dilakukan secara optimal karena pengembangan sumberdaya berupa pelatihan dan pembinaan belum terealisasi sesuai dengan target yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah hanya 1 kali mengadakan pelatihan dan pembinaan kepada nelayan. Selanjutnya pengembangan sarana dan prasarana belum dilakukan secara optimal karena pemerintah hanya memberikan bantuan sarana dan prasarana berupa alat tangkap, sedangkan sarana dan prasarana yang diperlukan tidak hanya alat tangkap. Selanjutnya pembentukan kelembagaan belum berjalan dengan baik karena pemerintah hanya membentuk kelompok tani tanpa melakukan pembinaan, sehingga kelompok tani tersebut tidak berjalan.¹³

Penelitian Kaulika dkk (2022) dengan judul “Peran Dinas Perikanan dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Nelayan (Studi pada Kampung Nelayan di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku)”. Permasalahan dalam penelitian Kaulika ini adalah masyarakat nelayan di lokasi penelitian masih dihadapkan pada permasalahan perekonomian, sehingga perlu adanya upaya pemberdayaan agar kesejahteraan masyarakat nelayan meningkat. Metode yang

¹³ Windasai., M.M. Said dan Hayat, Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Kepulauan Masalembu Kabupaten Sumenep), *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2, No. 3, 2021

digunakan adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan wawancara. Hasil penelitian Kaulika dkk menunjukkan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Seram Bagian Timur belum menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. Keterbatasan pelaksanaannya, baik peran maupun implementasi kebijakan masih terhambat sejumlah faktor, yaitu keterbatasan anggaran, kualitas SDM yang masih rendah, kebijakan pemerintah serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Implikasi peran Dinas Perikanan Kabupaten Seram Bagian Timur dalam pemberdayaan nelayan menunjukkan masih belum memberikan pengaruh positif terhadap kondisi perekonomian masyarakat nelayan.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisi Dampak Pemberdayaan Nelayan di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Studi Kasus di Dinas Perikanan)**”. Penelitian ini penting dilakukan mengingat masyarakat di Kecamatan Nipah Panjang ini memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, sehingga upaya pemerintah melalui Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jbaung Timur sebagai pihak yang memiliki tanggungjawab untuk mensejahterakan nelayan sangat diperlukan. Selain itu, upaya ini juga akan membantu nelayan untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai kesejahteraan yang optimal agar nelayan di Kecamatan Nipah Panjang ini dapat mandiri secara ekonomi, sosial, serta memiliki keterampilan dan kemampuan yang baik.

¹⁴ Zarita Kaulika R. Wattimena., Rustadi dan Suadi, Peran Dinas Perikanan dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Nelayan (Studi pada Kampung Nelayan di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku), *Jurnal Ketahanan Nasional*, Volume 28, Nomor 1, 2022

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja upaya Dinas Perikanan dalam melakukan pemberdayaan terhadap nelayan di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
2. Apa saja dampak dari kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan terhadap nelayan di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Dinas Perikanan melakukan upaya pemberdayaan terhadap nelayan di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan terhadap nelayan di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan kegunaan dari hasil penelitian ini. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai upaya-upaya pemberdayaan terhadap nelayan, sehingga nelayan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat mencapai kesejahteraan yang baik.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai penambah wawasan mengenai upaya pemerintah dalam melakukan pemberdayaan terhadap nelayan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian tentang upaya pemerintah dalam melakukan pemberdayaan terhadap nelayan.

1.5. Landasan Teori

1.5.1. Teori Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kemandirian suatu kelompok, dimana kelompok yang dimaksud adalah kelompok masyarakat.¹⁵ Konsep pemberdayaan ini muncul karena adanya teori Barbara Salomon pada tahun 1977 yang memahami masalah manusia dalam konteks lingkungan sosial, politik dan ekonomi kepada mereka yang memiliki keuntungan paling sedikit dalam masyarakat.¹⁶ Selanjutnya teori tersebut terus berkembang seiring dengan perubahan kebutuhan masyarakat, sehingga terbentuk teori baru yaitu teori Actors yang diungkapkan oleh Sarah Cook and Steve Macaulay pada tahun 1997, dimana teori ini lebih berorientasi kepada manusia semakin unggul

¹⁵ Mohamad Irhas Effendi dan Dyah Sugandini, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: UPN, 2013), hlm. 73

¹⁶ *Ibid.*

dan cenderung berkembang. Berdasarkan teori ini, pemberdayaan dibagi dalam beberapa tahap, diantaranya adalah tahap persiapan, tahap pengkajian, tahap perencanaan alternative program atau kegiatan, tahap pemformalisasi rencana aksi, tahap implementasi program, tahap evaluasi, dan tahap terminasi.¹⁷ Berdasarkan teori pemberdayaan tersebut, maka konteks pemberdayaan mengacu pada 3 aspek, yaitu:

- 1) Pembangunan perlu diarahkan pada perubahan struktur.
- 2) Pembangunan diarahkan pada pemberdayaan masyarakat guna mengentaskan masalah kesenjangan.
- 3) Pembangunan perlu diarahkan pada lintas sektor.¹⁸

Pemberdayaan itu sendiri atau yang dikenal dengan istilah empowerment yang berawal dari kata daya (power). Daya dalam arti kekuatan yang berasal dari dalam tetapi dapat diperkuat dengan unsur-unsur penguatan yang diserap dari luar. Pemberdayaan merupakan sebuah konsep untuk memotong lingkaran yang menghubungkan power dengan pembagian kesejahteraan. Keterbelakangan dan kemiskinan yang muncul dalam proses pembangunan disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam pemilikan atau akses pada sumber-sumber power.¹⁹

Pada dasarnya pemberdayaan merupakan suatu cara untuk memberikan kekuatan kepada kelompok lemah yang belum memiliki daya/kekuatan untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok dalam hidupnya sehari-

¹⁷ Karjuni D.T. Maani, Teori ACTORS dalam Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal Demokrasi*, Volume X, Nomor 1, 2011, hlm. 54

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 55

hari.²⁰ Pemberdayaan dapat juga diartikan sebagai proses di mana individu atau kelompok mampu meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka untuk memahami, menafsirkan masalah yang mereka hadapi dan kemudian mampu menentukan kebutuhan serta menerjemahkannya ke dalam tindakan dengan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan. Komponen utama pemberdayaan dalam hal ini adalah kemampuan individu untuk mendapatkan kontrol atau kendali dalam menentukan kehidupan mereka seperti yang mereka inginkan.

Terdapat dua kecenderungan proses pemberdayaan yaitu pertama adalah proses pemberdayaan yang menekankan ke proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dilengkapi dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Kecenderungan yang kedua adalah lebih menekankan melalui proses dialog. Kecenderungan ini terkait dengan kemampuan individu untuk mengontrol lingkungannya.²¹

Pada pemberdayaan ini, perlu adanya upaya-upaya untuk mendorong dan memotivasi kelompok lemah agar memiliki kemamp[uan dan keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Selain iut, pelaksanaan pemberdayaan juga harus dilaksanakan berdasarkan asas kerakyatan, dimana segala upaya diarahkan untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan masyarakat.²² Pemberdayaan merupakan kewajiban semua komponen bangsa termasuk di dalamnya peran serta aparatur

²⁰ Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, (Makassar: Dela Macca, 2018), hlm. 9

²¹ *Ibid.*

²² Saifuddin Yunus, *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017), hlm. 3

pemerintah menyangkut formulasi, implementasi, monitoring, hingga evaluasi dengan mengedepankan prinsip demokrasi, melibatkan peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi keanekaragaman masyarakat. Secara sederhana pemberdayaan masyarakat merupakan cara praktis dan produktif untuk memperoleh hasil terbaik bagi masyarakat yang dituntut bukan hanya pendelegasian namun kekuasaan ditempatkan secara tepat dan efektif

Pada prakteknya pemberdayaan menuntut lebih banyak kecakapan dan sumber daya manajerial antara lain membuat mampu (*enabling*), memperlancar (*fasilitating*), berkonsultasi (*consulting*), bekerjasama (*collaborating*), membimbing (*mentoring*), dan mendukung (*supporting*) yang mengakibatkan terciptanya keseimbangan pemenuhan aspek spiritual dan material, atau pemenuhan keseimbangan terhadap persoalan pengetahuan dan perekonomian (pendidikan dan pendapatan).²³

1.5.2. Bentuk-Bentuk Pemberdayaan

Hakikat pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Berdasarkan teori Actors hasil pemikiran Sarah Cook and Steve Macaulay pemberdayaan terhadap kelompok masyarakat ini menjadi tanggungjawab pemerintah, dimana pemerintah harus melakukan upaya-upaya yang tepat agar pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Upaya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari 4 indikator utama, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bina manusia

²³ *Ibid.*, hlm. 6

Bina manusia ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan posisi tawar menawar masyarakat dengan difokuskan pada dua hal, yaitu:

- a. Peningkatan kemampuan masyarakat
- b. Peningkatan posisi tawar menawar masyarakat.²⁴

2) Bina usaha

Bina usaha ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya adalah:

- a. Peningkatan produktivitas, perbaikan mutu dan nilai tambah produk.
- b. Perbaikan manajemen dan jejaring kemitraan.
- c. Pengembangan jiwa kewirausahaan
- d. Peningkatan aksesibiliti modal, pasar dan informasi.
- e. Advokasi kebijakan yang berpihak pada pengembangan ekonomi rakyat.²⁵

3) Bina lingkungan

Bina lingkungan dapat dilakukan dengan melibatkan partisipasi dari seluruh pihak yang dapat mendukung dan membantu pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan sosial, seperti pemerintah dan lain sebagainya.²⁶

4) Bina kelembagaan

²⁴ Hendrawati Hamid, *Op.,Cit.* hlm. 102-103

²⁵ *Ibid.*, hlm. 104

²⁶ *Ibid.*

Bina kelembagaan dilakukan dengan memperkuat kelembagaan agar dapat berfungsi secara efektif dan menjadi wadah untuk mendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.²⁷

Pada dasarnya, upaya pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

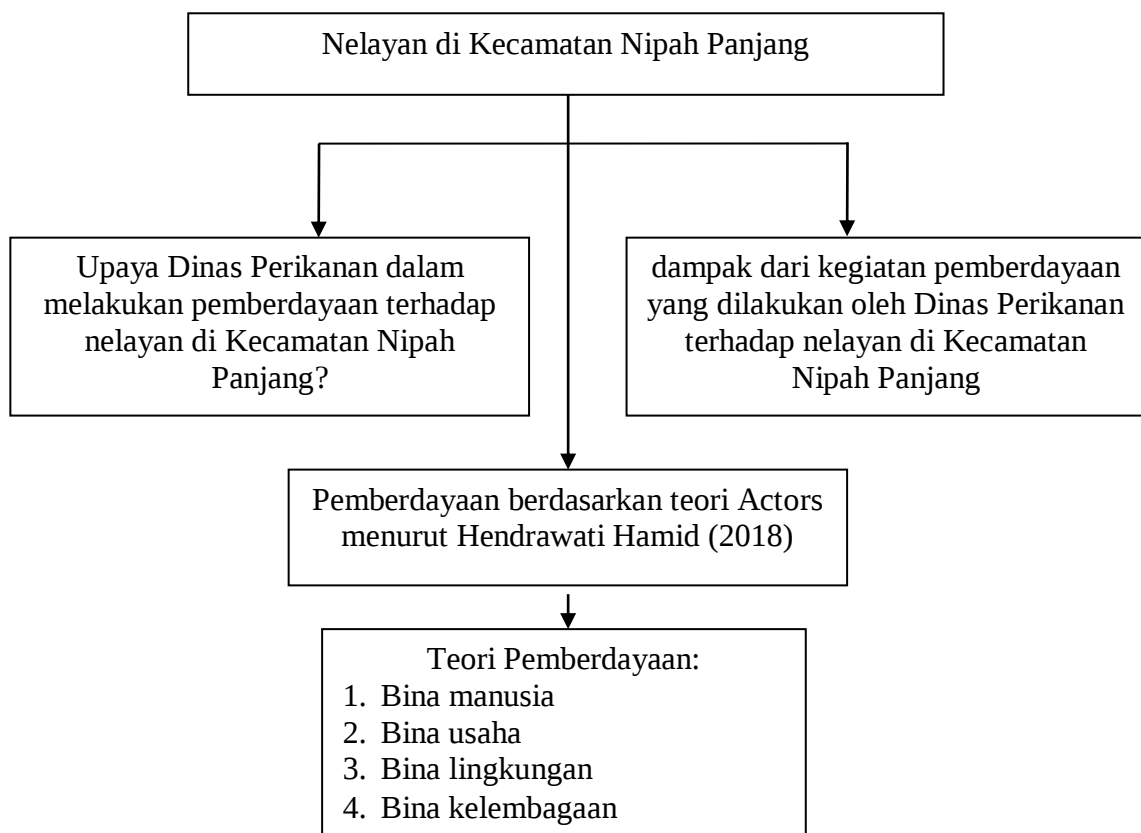
1.6. Kerangka Pikir

Nelayan di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan nelayan tradisional yang melakukan penangkapan ikan secara mandiri. Akibatnya nelayan di Kecamatan Nipah Panjang ini sering dihadapkan pada berbagai permasalahan seperti keterbatasan modal yang berakibat pada nelayan mengalami kendala pembiayaan dan pendanaan, keterbatasan akomodasi untuk melaut dan alat tangkap yang masih tradisional, serta adanya keterbatasan keterampilan, keahlian dan kemampuan untuk mengembangkan usaha penangkapan ikan yang dimiliki. Hal ini dikarenakan nelayan belum mampu mengembangkan usahanya, seperti memanfaatkan hasil tangkapan untuk dijadikan usaha baru, melakukan pencatatan atau pembukuan, serta belum ada

²⁷ *Ibid.*, hlm. 105

nelayan yang melakukan pengolahan hasil tangkapan agar memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi.

Kondisi ini menyebabkan perlunya upaya pemberdayaan dari Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kegiatan pemberdayaan ini dilakukan dengan tujuan agar nelayan di Kecamatan Nipah Panjang dapat hidup dengan mandiri dan tidak hanya bergantung pada satu usaha saja. Pemberdayaan ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pembinaan terhadap manusianya sendiri, pembinaan terhadap usaha, lingkungan dan kelembagaan. Meskipun dalam pelaksanaannya nanti ditemui beberapa kendala yang menyebabkan upaya tersebut belum dapat dilakukan optimal. Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Artinya dalam penelitian ini, penulis berupaya untuk mendeskripsikan fakta-fakta yang diperoleh melalui kegiatan pengamatan secara langsung di lapangan dan wawancara dengan informan.

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis, factual dan akurat mengenai fenomena-fenomena yang ada di lapangan.²⁸ Pada hal ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif sebagai upaya untuk mendeskripsikan upaya untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh Dinas Perikanan untuk melakukan pemberdayaan terhadap nelayan, serta dampak dari kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan terhadap nelayan di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

1.7.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pemilihan lokasi ini atas dasar di kelurahan ini banyak terdapat nelayan dengan skala usaha kecil dan menengah, sehingga mereka memiliki keterbatasan modal dalam melaut dan membutuhkan upaya pemberdayaan agar nelayan ini dapat mandiri dan mencapai kesejahteraan hidup.

²⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 12

1.7.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pokok permasalahan dalam penelitian. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah upaya untuk mendeskripsikan upaya untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh Dinas Perikanan untuk melakukan pemberdayaan terhadap nelayan, serta dampak dari kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan terhadap nelayan di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

1.7.4. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber yang digunakan untuk memperoleh data, dimana sumber data menjadi faktor penting yang menjadi sumber pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Berdasarkan hal tersebut, maka sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dari sumber asli atau informan untuk memperoleh data atau informasi yang akurat. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sebagai bahan pendukung untuk memudahkan penelitian ini. Data sekunder dapat bersumber dari buku-buku, catatan Kecamatan, literature dan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan.

1.7.5. Teknik Penentuan Informan

Informan merupakan pihak yang akan dijadikan sebagai sumber data primer. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* atau penentuan sampel secara sengaja berdasarkan ciri-ciri tertentu. Kriteria yang digunakan adalah informan yang memiliki kewenangan untuk menjawab mengenai upaya untuk mendeskripsikan upaya untuk mendeskripsikan upaya untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh Dinas Perikanan untuk melakukan pemberdayaan terhadap nelayan, serta dampak dari kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan terhadap nelayan di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Berdasarkan hal tersebut, maka informan yang akan dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3.
Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Defriany, S.Pi	Kabid Pengelolaan Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
2	Ulfi Rahmad, S.STP	Camat Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur
3	Zul, Rahmanto, Didit, Mulyana dan Romzi	Nelayan Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan. Teknik wawancara digunakan untuk mewawancarai informan secara langsung mengenai upaya untuk mendeskripsikan upaya untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh Dinas Perikanan untuk melakukan pemberdayaan terhadap nelayan, serta dampak dari kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan terhadap nelayan di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data menggunakan dokumen-dokumen yang sudah ada. Pada hal ini peneliti lakukan dengan cara mengambil data yang akurat dengan metode pengambilan gambar dan data-data tertulis untuk mendukung keabsahan data yang diperoleh. Dokumen yang dimaksud seperti data-data dari Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, buku, jurnal dan lain sebagainya.

1.7.7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah cara peneliti untuk mengolah dan mejabarkan hasil yang diperoleh di lapangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:²⁹

²⁹*Ibid.* hlm. 348

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi merupakan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Sehingga perlu dilakukan pemilihan data yang relevan untuk dapat disajikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di penelitian. Setelah melakukan pemilihan data, data yang telah dipilih kemudian disederhanakan dengan mengambil data yang pokok dan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian.³⁰

b. Penyajian data

Data yang telah disusun melalui kegiatan reduksi data, kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Data yang disajikan adalah data yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Setelah data disajikan secara rinci, maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah membahas data yang telah disajikan tersebut.³¹

c. Penarikan kesimpulan

Setelah data disajikan dan telah dibahas secara rinci, maka tahap selanjutnya adalah tahap pengambilan kesimpulan. Tujuan dari penarikan kesimpulan adalah untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.³²

1.7.8. Triangulasi Data

Triangulasi adalah suatu pendekatan riset yang memakai suatu kombinasi lebih dari satu strategi dalam suatu penelitian untuk menjangkau data/informasi. Dalam penelitian dapat dipergunakan 3 jenis triangulasi, yaitu:

³⁰*Ibid.* hlm. 274

³¹*Ibid.*

³²*Ibid*

1. Triangulasi dengan Sumber Data

Dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan. Penilaian hasil penelitian dilakukan oleh responden, mengoreksi kekeliruan oleh sumber data, menyediakan tambahan informasi secara sukarela, memastikan informan dalam kancah penelitian, menciptakan kesempatan mengikhtisarkan sebagai langkah awal analisis data menilai kecakupan menyeluruh data yang dikumpulkan.

2. Triangulasi dengan Metode

Triangulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode interview sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi ketika di interview. Begitu pula teknik ini dilakukan untuk menguji sumber data, apakah sumber data ketika di interview dan observasi akan memberikan informasi yang sama atau berbeda.

3. Triangulasi dengan Teori

Triangulasi dengan teori berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa dengan derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Hal ini dapat dilakukan sebagai pembanding teori dengan menyertakan usaha pencarian teori dengan cara lainnya untuk mengorganisasikan data yang mungkin mengarahkan pada upaya penemuan penelitian yang lebih relevan.